



Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Masih Minim **KKR Terancam Tak Lagi Dapat WTP**

SUNGAI RAYA-RK. Masih ditemukan minimnya penyerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahannya, mengancam Pemkab Kubu Raya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Minimnya penyerapan anggaran ditemukan di Dinas Pendidikan Kubu Raya. Serapan anggaran yang dilakukan hanya berkisar 30 persen. Sementara tutup buku tahun anggaran tinggal tiga bulan lagi. Selain itu, ditemukan tumpang-tindih perusahaan kontruksi yang akan mengerjakan proyek fisik maupun pengadaan di Dinas Pendidikan. Kecerobohan inilah yang diduga menjadi biang kerok minimnya penyerapan anggaran di Dinas Pendidikan Kubu Raya.

"Kami minta Bupati Kubu Raya memantau hingga mengevaluasi kinerja kepala SKPD

tersebut. SKPD seperti Dinas Pendidikan ini harus diawasi dan dievaluasi kinerjanya. Kami berhak meminta eksekutif untuk melakukan evaluasi, karena salah satu tugas kami menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah," tegas Suprpto, Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, kemarin.

Salah satu alasan DPRD meminta evaluasi kinerja SKPD, karena fraksi melihat masih terdapat SKPD yang memiliki anggaran cukup besar, namun serapan anggarannya masih kecil. Misalnya saja, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya. "Serapan anggaran ini seharusnya bisa dioptimalkan, mengingat penghujung tahun 2015 tinggal beberapa bulan lagi," katanya.

Minimnya penyerapan anggaran, secara tak langsung akan merugikan masyarakat. Sejak awal pemerintah telah menetapkan target pembangunan menggunakan ang-

garan yang telah disediakan. Namun proses pembangunan tak kunjung dilakukan Dinas Pendidikan Kubu Raya.

"Beberapa waktu lalu kami sempat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Salah satu alasan masih minimnya serapan anggaran, karena regulasi dinas terkait terkadang naik turun. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum bisa bekerja maksimal. Kami berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan, sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal," tegas Suprpto.

DPRD juga menyorot kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kubu Raya. Selama ini koordinasi antara Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kasi dan staf di Dinas Perikanan dan Kelautan berjalan tidak baik. Agar hasil kerja dinas tersebut bisa optimal, DPRD minta Bupati Kubu Raya memantau dan dievaluasi. "Sehingga optimalisasi pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,"

beber Suprpto.

Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH menyambut baik masukan atau saran dari DPRD. "Soal SKPD ini, saya berikan waktu hingga tiga bulan ke depan. Saya berharap setiap SKPD yang sedang mendapat sorotan ini, bisa membenahi dan meningkatkan kualitas kinerjanya," kata Rusman Ali.

Namun jika selama waktu yang diberikan ditemukan kepala SKPD yang tidak bisa menunjukkan perubahan yang lebih baik, Rusman Ali berjanji akan mengganti kepala SKPD yang bersangkutan.

"Saya berharap dengan sisa waktu yang ada, semua SKPD di Kubu Raya bisa bekerja maksimal. Sehingga semua target pembnagnan sepanjang tahun 2015 ini bisa terealisasi dengan baik," harap Bupati Rusman Ali.

*Laporan: Syamsul Arifin
Editor: Hamka Saptono*